

**Peran PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Yaman Pada
Tahun 2015-2018**

SKRIPSI



Oleh:

BAYU GUNA AGAMA

15323007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**Peran PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Yaman Pada
Tahun 2015-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

BAYU GUNA AGAMA

153232007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Yaman Pada Tahun
2015-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Nama Ketua Prodi

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 **Penguji Skripsi 1**

2 **Penguji Skripsi 2**

3 **Penguji Skripsi 3**

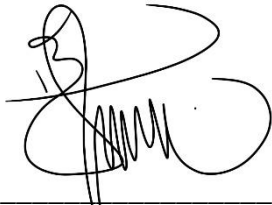
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal, 27 Januari 2023



Bayu Guna Agama

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	10
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	11
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	11
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	11
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	11
1.9 Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
UPAYA PBB DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN	14
2.1. Sejarah Konflik Yaman	14
2.2. Upaya PBB dalam Menanggapi Konflik Yaman	17
2.2.1 <i>Bantuan Dana</i>	17
<i>Tabel 1. Sepuluh Negara Penyumbang Donasi Terbanyak</i>	19
<i>Tabel 2. Alokasi Dana</i>	20
2.2.2. <i>Bantuan Diplomatik</i>	21
2.2.3. <i>Upaya Perdamaian PBB</i>	25
BAB III	29
ANALISIS PERAN PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM DI YAMAN TAHUN 2015-2018	29
3.1. <i>Setting Human Rights Standard and Norms</i>	29
3.2 Monitoring Human Rights	31

3.3 Promoting Human Rights	34
3.4 Enforcing International Human Rights Norms	35
BAB IV	40
PENUTUP	40
2.1. Kesimpulan	40
2.2 Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	42



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Tulis Judul Tabel Anda di Sini



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Yaman masih terus berlanjut membuat negara tersebut ke dalam predikat negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, hal ini sebagaimana pernyataan Sekertaris Umum PBB, Antonio Guterres pada saat konferensi di Jenewa. *“The war in Yemen is now the world’s worst humanitarian crisis, with more than 22 million people, three quarters of the population in desperate need of aid and protection.”* (Nikbakht dan McKenzie 2018). Menurut The Yemen Data Project, lebih dari 17.500 warga sipil tewas dan terluka dan seperempat dari semua warga sipil yang tewas dalam serangan udara adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 20 juta orang di Yaman mengalami kerawanan dalam mendapatkan pangan, 10 juta di antaranya terancam kelaparan (Roth 2019).

Amnesty International mencatat telah lebih dari dua puluh juta jiwa sangat memerlukan bantuan kemanusiaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat Yaman. Menurut Antonio Guterres selaku sekretaris jendral Perserikatan Bangsa Bangsa, dari konflik yang terjadi terdapat lebih dari satu juta jiwa masyarakat Yaman yang mengalami dampak tidak langsung berupa terserang wabah diare dan kolera, akibat dari hancurnya perekonomian dan juga layanan kesehatan serta fasilitas masyarakat lainnya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi pandemi di kalangan masyarakat Yaman. Sementara itu juga hampir tiga juta balita dan ibu hamil atau yang sedang menyusui mengalami kondisi malnutrisi, serta mengalami kondisi disabilitas akibat dari krisis yang terjadi (Yee 2020).

Konflik yang terjadi di Yaman merupakan konflik yang sudah terjadi dari jaman dahulu kala, konflik ini terjadi karna adanya pergesekan antara kubu pemerintah dengan masyarakat sipil Yaman. Dengan begitu banyaknya histori akan konflik yang terjadi di Yaman, konflik ini menjadi semakin besar dan mulai mencapai titik puncaknya pada masa pemerintahan yang dipimpin Ali Abdullah

Shaleh. Dimana pada masa itu, disaat Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi kesatuan sebuah negara dari uifikasi yang telah terbentuk, stabilitas negara belum sampai ke titik aman karena faktor histori dari konflik masa lalu, kemudian dimasa itu pun terjadinya fenomena Arab Spring, yang di perburuk juga dengan sistem pemerintahan Ali Abdullah Shaleh dengan latar begitu banyak peristiwa yang meresahkan masyarakat Yaman seperti tindakan korupsi, kemiskinan, perselisihan ekonomi, dan yang paling dominan adalah kesenjangan sosial. Saleh memiliki cara untuk menyuap para pemimpin militer daerah dan pemerintahan untuk kepentingan dirinya. Sikapnya ini diduga karena memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Amerika Serikat dan kaum *Wahabi-Salafisme* yaitu kelompok penentang komunitas lokal dan tradisional (Ghafur 2015).

Atas dasar kepemimpinan Ali Abdullah Shaleh yang begitu korup dinilai oleh masyarakat, mulailah timbul gerakan sparatisme yang menghasilkan pemberontakan bagi pemerintah dengan masyarakat (Jediza 2017). Bentrok yang terjadi antara demonstran dan militer negara sendiri terus-menerus terjadi hingga banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Bagi Ali Abdullah Shaleh hal ini terus dilakukannya bagi siapapun yang berani menentang segala kebijakannya akan dibasmi atau dilenyapkan.

Konflik yang terus terjadi semakin memanas membuat munnculnya kelompok yang menamai diri mereka sebagai kelompok Houhi, yang merupakan kelompok agama beraliran syiah dan kemudian berputar arah menjadi oposisi pemerintah (Maulana 2018). Keberhasilan Houthi sebagai kelompok oposisi adalah ia sering melakukan serangan terhadap pemerintahan, hasil serangan ini berupa dikuasainya wilayah-wilayah utama termasuk ibu kota Yaman yaitu Sana'a. Houthi yang beraliran Syiah mendapat respon baik oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iran dengan aliran yang sama. Iran menganggap Houthi adalah seorang kawan. Faktor inilah yang akhirnya membuat Houthi memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melawan pemerintahan Yaman.

Semasa turunnya Ali Abdullah Saleh dari kursi kepemimpinan di Yaman, yang kemudian dilanjutkan oleh Abdurrabu Mansyur Hadi. Di tahun 2014 kelompok Houthi mulai menguasai wilayah di Sana'a yang diikuti beberapa

serangan kepada pihak pemerintah, yang pada saat itu kelompok Houthi mendapat banyak dukungan dari masyarakat Yaman dengan membawa isu kemiskinan, pendidikan, ekonomi dan reformasi pemerintahan. Pada awal tahun 2015 kelompok Houthi berhasil memukul mundur pemerintahan Hadi hingga ia dan para mentrinya mengundurkan diri, kelompok Houthi pun yang berhasil mengambil alih wilayah Sana'a.

Tidak hanya berdampak pada stabilitas negaranya sendiri, konflik ini juga membuat Arab Saudi berpandangan bahwa ideologi yang dibawa Houthi dapat mengancam keberadaan ideologi lain seperti Sunni yang digunakan oleh Arab Saudi. maka akhirnya Arab Saudi membuat suatu aliansi dengan berbagai negara seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan untuk mengintervensi konflik yang ditimbulkan Houthi di Yaman. Dikatan juga alasan lain dari Arab Saudi mengintervensi Yaman bukan hanya perbedaan ideologi yang di bawa Houthi, melainkan juga Arab Saudi melihat letak geografis Yaman yang dianggap memiliki potensi pada bidang sumber daya dengan kadar tanah yang subur, terlebih posisi dari adanya *Bab-el-Mandeb* yang menjadikan Yaman sebagai incaran bagi negara-negara lain (Maulana 2018).

Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan aliansinya megakibatkan dampak yang sangat negatif terhadap masyarakat Yaman, meliputi di dalamnya krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan, keselamatan, kesejahteraan serta hak-hak dasar masyarakat. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) pada November 2018, diperkirakan mencapai 6.872 korban tewas dan 10.768 korban terluka, yang mayoritas disebabkan oleh serangan udara koalisi Arab Saudi.

Jika dilihat dari latar belakang diatas menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara kelompok Houthi dengan pemerintah Yaman mendapatkan banyak campur tangan dari negara luar, dengan dalih meredakan konflik yang terjadi. Namun pada faktanya intervensi yang dilakukan negara-negara lain justru memperparah keadaan terutama masyarakat sipil yang banyak terkena dampak dari perang yang dijalankan.

Yang kemudian muncul lah pertanyaan bagaimana HAM bagi masyarakat Yaman, yang notabene nya bukan pasukan perang yang dipersenjatai. Sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dibentuk pada tahun 1948, HAM menjadi hak universal bagi setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi, Segala jenis kejahatan terhadap kemanusiaan atau pun genosida, saat ini sudah dikenal sebagai pelanggaran HAM (Clapham 2007).

Perserikatan Bangsa-bangsa atau *United Nations* merupakan organisasi paling besar di dunia yang mana hampir dari seluruh negara di dunia ini menjadi bagian dari keanggotaannya. PBB memiliki tugas yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, PBB banyak berperan penting dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Contoh konkritnya adalah, PBB banyak mengeluarkan banyak instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dengan ini maka bisa dipastikan bahwa PBB merupakan organisasi dunia yang didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia serta melindungi hak asasi manusia.

Pada tulisan ini, penulis akan membahas tentang bagaimana peran PBB dalam menghadapi konflik Yaman yang banyak tercatat pada laporannya masyarakat sipil mengalami banyak pelanggaran kemanusiaan akibat perang yang terjadi. Dalam tulisan ini juga penulis akan memfokuskan kurung waktu penelitian dari tahun 2015 hingga tahun 2018, dimana pada tahun ini konflik yang terjadi semakin memuncak dinilai dari kekuasaan kelompok Houthi yang semakin meluas, pemerintah Yaman yang meminta bantuan militer dari negara lain, serta angka masyarakat Yaman yang meninggal maupun butuh bantuan kemanusiaan terus meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu, “apa Peran PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Yaman Pada Tahun 2015-2018?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya dalam arah penulisan ini, penulis menjabarkan tujuan umum dari apa yang akan dibahas dalam penulisan ini. Ditinjau dari rumusan masalah diatas mengenai peranan PBB dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman yang terjadi karena konflik berkelanjutan, terutama pada tahun 2015-2018 dimana pada rentang waktu tersebut konflik yang terjadi bertemu pada klimaksnya antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman, serta banyaknya ikut campur tangan dari negara luar yang notabene nya adalah negara besar. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi di Yaman.
2. Untuk mengetahui bentuk peranan serta strategi PBB dalam menangani krisis pangan di Yaman.
3. Untuk mengetahui keefektifan PBB dalam menangani krisis pangan di Yaman.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penulisan ini penulis memfokuskan penelitian pada level organisasi internasional, organisasi Internasional yang terdiri dari pengelompokan negara-negara anggota yang tergabung dalam satu tempat dalam menangani spesialisasi isu

secara spesifik. Penelitian pada level organisasi internasional ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan (Mas'oeed 1990, 47).

Pada penulisan ini, analisis yang dilakukan lebih terfokuskan pada peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani krisis pangan di Yaman dalam rentang waktu 2015 sampai 2018. Rentang waktu penelitian yang dipilih bermula pada tahun 2015, di mana pada tahun ini terjadi peningkatan krisis kemanusiaan dikarenakan adanya peristiwa arab spring serta konflik yang terjadi diperparah dengan adanya intervensi dari Arab Saudi dalam memberikan bantuan terhadap pemerintah Yaman.

Dari hal tersebut menjadi perhatian penulis terhadap peningkatan krisis kemanusiaan yang terjadi dan bantuan yang diterima oleh Yaman. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kasus tersebut menggunakan konsep *Protecting Human Rights* milik Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles, untuk meneliti peranan apa saja yang dilakukan PBB dalam menangani krisis HAM di Yaman.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga study terdahulu sebagai referensi penulisan berupa jurnal ilmiah. Jurnal yang pertama berjudul “Living with insecurity: Food security, resilience, and The World Food Programme (WFP)” yang ditulis oleh Daniel O'Connor, Philip Boyle, Suzan Ilcan, dan Marcia Oliver yang diterbitkan oleh jurnal *Global Social* pada tahun 2017. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang peran WFP sebagai pemberi bantuan pangan kepada Sub Sahara Afrika khususnya Ethiopia, dalam tindakannya WFP menjalankan program berupa *Managing Environmental Resources to Enable Transitions to More Sustainable Livelihoods*” (MERET) (O'Connor, et al. 2017). Program MERET ini menekankan pada aspek aset ketersediaan pangan yang ada bagi masyarakat sekitar dan komunitas secara berkelanjutan. Diharapkan Program MERET ini sebagai

upaya preventif dalam meminimalisir masalah kelangkaan pangan di masa pancaroba mendatang (O'Connor, et al. 2017).

Dari jurnal yang pertama dengan penelitian ini memiliki kesamaan dari topik penelitian berupa peranan organisasi internasional dalam menangani krisis yang terjadi pada suatu negara. Di jurnal yang pertama terfokus pada peran WFP di Ethiopia terhadap tindakan preventif pra-bencana, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada peran PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Yaman pasca intervensi militer dari Arab Saudi. Ditinjau dari jurnal pertama ini penjelasan pada aspek peranan organisasi internasional dan krisis pangan menjadi acuan bagi penulis terhadap kesamaan topik penelitian.

Pada jurnal yang ke dua, penulis menggunakan penelitian berjudul "*The Changing Nature of International Organization: An Argument for Eclecticism*", karangan Steve Biederman (Biederman 2016). Pada penelitian ini menjelaskan bahwa analisis contoh kasus yang berbeda di dalam sistem PBB menunjukkan organisasi internasional di saat yang sama dapat masuk kedalam peran yang berbeda. PBB didirikan dengan kesepakatan dari beberapa negara anggota guna memenuhi tujuan serta kehendaknya bagi negara anggota. Bahkan sampai saat ini pun yang notabene nya PBB sudah memiliki banyak negara anggota, tetapi tetap kendali proses didalam regulasinya tetap di kendalikan oleh lima negara tetap Dewan Keamanan PBB (Biederman 2016, 68). Akan tetapi tidak juga semua keputusan dari anggota nya dikatakan mutlak, mereka juga memenuhi perannya sebagai organisasi internasional melalui tingkat tinggi institusionalisasi dan pekerjaan permanen sekretariat, badan tambahan, dana dan program lanjutan untuk bekerja sama dengan negara-negara lain ataupun aktor dari masyarakat sipil.

Pada jurnal yang kedua ini, memiliki kesamaan dengan penulis pada topik penjelasan yang keduanya menggunakan konsep peran organisasi internasional dalam menyelesaikan beberapa kasus yang berbeda. Sedangkan penulis lebih terfokuskan pada peran organisasi internasional PBB pada negara Yaman.

Di jurnal yang ke tiga penulis menggunakan penelitian berjudul "*Millions In Need Of Humanitarian Assistance In Yemen*" yang ditulis oleh Sharmila Devi

(Devi 2017). Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Yaman saat invasi Arab Saudi, yang pada kasusnya jutaan masyarakat Yaman sangat membutuhkan bantuan dari luar dikarenakan kondisi negaranya yang sangat *chaos* karna adanya konflik tersebut. Dikatakan juga bahkan Arab Saudi sampai menghalangi bantuan dari organisasi internasional seperti UNICEF, WHO dan WFP, baik jalur darat, laut maupun udara.

Sama halnya dengan jurnal terdahulu yang penulis gunakan sebelumnya sebagai referensi, dalam jurnal yang ke tiga menjadikan UNICEF sebagai object pembantu dalam menangani krisis di Yaman serta terhambatnya akses bantuan dari luar karna adanya pemblokiran jalur oleh Arab Saudi. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan PBB sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menangani krisis kemanusiaan di Yaman akibat konflik tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis akan meneliti peranan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Yaman dengan menggunakan konsep *Protecting Human Rights* milik Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles (Karns, Mingst, & W, 2015).

Dalam konsep *Protecting Human Rights* yang dijelaskan Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles terdapat 4 aspek yang dapat dilakukan dalam menangani krisis kemanusiaan, yaitu:

1. Setting Human Rights Standards and Norms

Merupakan sebuah peran penting yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam mendorong hukum domestik dan perjanjian internasional untuk menetapkan standar hak asasi manusia. Dimana dalam menetapkan standar dan norma HAM dilakukan sebagai upaya perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia di dunia. Dalam

menyampaikan norma dan mengkodifikasikan standar HAM ditunjukkan dalam sebuah perjanjian, serta keputusan hukum. Peran yang dilakukan organisasi internasional yaitu membantu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui ratifikasi perjanjian internasional HAM atau instrumen HAM.

2. *Monitoring Human Rights*

Merupakan sebuah pemantauan dalam penerapan standar hak asasi manusia dengan memerlukan prosedur untuk menerima pengaduan atau laporan mengenai pelanggaran dari suatu individu yang terkena dampak atau sebuah kelompok yang berkepentingan dan laporan dari praktik negara. Dalam monitoring terhadap hak asasi manusia disini juga mengumpulkan berbagai informasi mengenai situasi hak asasi manusia di suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode yang tersedia dan dengan tujuan terlibat advokasi untuk mengatasi pelanggaran dan praktik hak asasi manusia.

3. *Promoting Human Rights*

Seperti yang dikemukakan oleh Margaret P.Karns, Karen A.Mingst dan Kendall W. Stiles dalam bukunya, *Promoting* atau mempromosikan Hak Asasi Manusia adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam tata Kelola Hak Asasi manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang (Karns, Mings and Stiles 2015, 497). Organisasi internasional secara operasional diarahkan untuk mempromosikan hak-hak secara proaktif yang berdasarkan pada integrasi norma, prinsip dan standar hak asasi manusia kedalam suatu kebijakan.

4. *Enforcing International Human Rights Norms*

Enforcing atau penegakan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu upaya organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi. Dalam penegakan

HAM dapat melalui dua pendekatan melalui *National Court* serta *Coercive Measure* (Tindakan pemaksaan). Dalam *National court* atau pengadilan nasional dapat digunakan untuk menegakan norma-norma internasional serta pengadilan nasional ini dapat digunakan oleh individu biasa, LSM atau hakim aktivis. Sedangkan *Coercive Measure* atau Tindakan pemaksaan dapat digunakan oleh pemerintah dan kelompok negara, dimana masyarakat internasional dapat menjatuhkan sanksi melalui PBB atau IGO regional atau dapat melakukan tekanan internasional terhadap pihak yang melakukan pelanggaran HAM.

Pada tahapan awal, bagi negara keanggotaan PBB memiliki dewan HAM yang memiliki mandat untuk mengawasi setiap pelanggaran HAM yang terjadi serta membantu bagi negara anggota menyusun undang-undang tentang HAM. Pada tahap kedua, PBB memonitoring segala konflik yang terjadi di Yaman terutama keikutsertaan negara lain terhadap konflik tersebut. Di tahapan ketiga, PBB banyak juga melakukan lobi terhadap aktor-aktor yang terlibat pada konflik tersebut. Di tahapan keempat, PBB membuat perundingan antara negara-negara serta kelompok yang ambil andil pada konflik yang terjadi.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara pada penelitian ini berupa PBB yang merupakan organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia memiliki kewajiban terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman, didasari pada penelitian yang mengacu dari *setting human right, monitoring human rights, promoting human rights* dan *enforcing human right*. Menjelaskan tahapan serta cara yang diambil PBB untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif, yang mana pada pengaplikasiannya penelitian deskriptif ini menggunakan metode riset kepustakaan. Di dalam metode riset kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti sumber data seperti pengumpulan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, yang kegunaannya untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data (Khatibah 2011).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, menjadikan peranan PBB sebagai subjek penelitian yang mana telah banyak diketahui bahwa organisasi internasional ini menjadi tiang perdamaian bagi negara-negara anggotanya, sedangkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman menjadi objek penelitian.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana tidak menggunakan data bersifat numerik. Dalam penelitian ini menggunakan data pustaka, dengan artian data yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan data yang dikumpulkan dari studi-studi terdahulu mengenai kasus yang relevan dengan kasus serupa yang dianalisa dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada penelitian ini juga menggunakan sumber berupa jurnal, artikel dan situs resmi dari media, yang memungkinkan penulis memahami perkembangan

kasus yang terjadi. Data yang dikumpulkan penulis merupakan data yang didapat melalui jejaring sosial, yang kemudian diseleksi berdasarkan relevansi akan keterkaitannya dengan kasus yang dibahas, dari data yang telah diseleksi menjadi acuan penulis sebagai sumber utama, studi terdahulu maupun data pendukung argumen yang kemudian di saring menjadi hasil dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

penelitian ini tersusun dari 4 bab pembahasan dengan teknik penulisan sebagai berikut; BAB I pendahuluan, yang terbagi menjadi beberapa subbab berupa; latar belakang, berisi tentang penjelasan singkat mengenai fenomena yang terjadi juga alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah, merupakan pertanyaan penelitian yang mengacu pada isi pembahasan penelitian ini. Tujuan penelitian, merupakan tujuan yang di harapkan penulis dapat tercapai melalui penelitian ini. Cakupan penelitian, merupakan ruang lingkup atau skala yang di jangkau dari penelitian ini. Tinjauan pustaka, berisi tentang studi terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan, serta pembandingan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran, berupa konsep dasar yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Argumen sementara, berupa hasil sementara dari final penelitian ini yang ditinjau dari studi kasus yang ada. Metode penelitian, berupa metode yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. serta sistematika pembahasan.

BAB II profil PBB, pada bagian ini menjelaskan kembali apa itu PBB, fungsinya terhadap pelanggaran yang terjadi di antara negara keanggotaannya,

terutama pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman yang mana menjadi objek penelitian pada penulisan ini.

BAB III analisa, merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan tentang analisa dari rumusan masalah yang akan dikaji dengan menerapkan variabel dari konsep *Protecting Human Rights* terhadap rumusan masalah yang dicari.

BAB IV penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi penulis mengenai kasus yang terjadi.



BAB II

UPAYA PBB DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN

2.1. Sejarah Konflik Yaman

Negara Yaman terbentuk dari dua wilayah berbeda yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990, konflik yang terjadi di Yaman sudah ada dari sejak dahulu kala, banyak upaya yang dilakukan agar konflik ini mereda sampai pada titik *unifikasi* menjadi pilihan sebagai jalan tengah yang digadang dapat membawa perdamaian ke wilayah tersebut, namun sayangnya konflik serta krisis masih terus melanda wilayah tersebut.

Ditahun 1992 Yaman mengalami krisis ekonomi yang membuat pecahnya konflik kembali memburuk, ditambah keberadaan kelompok sparatis yang ingin melepaskan diri untuk membangun negara merdeka bagi mereka sendiri, dengan menyebut diri mereka sebagai kelompok Houthi (Saja, 2021). Adapun alasan yang dilakukan kelompok Houthi ini ialah berdasarkan ketidaksetujuan karena menganggap pemerintah Yaman lebih memihak pada negara-negara barat, dan lebih banyak mengalirkan hasil sumber daya ke bagian utara tepatnya di Ibu Kota Sana'a. Selain itu pemimpin kelompok separatis juga beranggapan bahwa presiden Ali Abdul Saleh melakukan korupsi dengan skala masif yang mengendalikan inti sektor militer serta ekonomi melalui kerkerabatnya yang berkuasa. Pertentangan ini kemudian memunculkan gerakan revolusi di Yaman yang diduga didukung oleh Iran.

Kelompok Houthi terbentuk dari tindakan pemerintah Yaman yang diduga melakukan tindakan diskriminasi terhadap komunitas Zaydi yang memiliki aliran Syiah dibagian utara Yaman di ahir tahun 1990-an, karena hal ini kelompok tersebut berbalik melawan pemerintah dengan membentuk kelompok sparatis bernama Houthi. Konflik yang terjadi antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman semakin memburuk, di tahun 2004 pemimpin kelompok Houthi terbunuh akibat tindakan keras yang dilakukan pemerintah Yaman, hal ini semakin membuat kelompok Houthi melakukan pemberontakan terus menerus, sampai pada tahun 2011 kelompok Houthi melakukan unjuk rasa besar-besaran menyuarakan anti pemerintah dengan tujuan ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Yaman yang kemudian membangun ulang sistem pemerintahan dengan ideologi mereka yaitu Syi'ah. Usaha yang dilakukan oleh kelompok Houthi ini membuahkan hasil dengan lengsernya kepemimpinan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden Yaman yang telah menjabat selama lebih dari tiga dekade (Antoni, 2012).

Pasca lengsernya Ali Abdullah Saleh, kepemimpinan Yaman diambil alih oleh wakil presiden yang maju sebagai pemimpin selanjutnya yaitu Abd Rabbuh Mansur Hadi. Karena rencana awal kelompok Houthi yang ingin mendirikan idealisnya pada pemerintahan Yaman tidak terlaksana, di tahun 2014 kelompok Houthi tidak lagi melakukan unjuk rasa seperti cara yang mereka gunakan sebelumnya, melainkan mereka bergerak lebih anarki melalui pemberontakan langsung terhadap pemerintah Yaman (Bayoumy & Ghobari, 2014), mereka melakukan pengepungan di istana kepresidenan dengan tujuan memaksa pemerintah Yaman untuk melakukan negosiasi dalam membentuk pemerintah persatuan dengan faksi politik lainnya.

Sampai pada akhirnya di tahun 2015 presiden Hadi mengundurkan diri dan melarikan diri ke Riyadh. Dengan begitu kursi kepemimpinan di Yaman pun kosong, kelompok Houthi tidak tinggal diam dengan situasi kekosongan tersebut karena memang dari awal memang seperti ini lah tujuan mereka. Hingga akhirnya pada saat itu Yaman dipimpin oleh kelompok Houthi, mereka juga membubarkan Parlemen dan membuat Komite Revolusioner. Tidak lama setelah itu mantan presiden Hadi diam-diam meminta bantuan kepada Arab Saudi yang diikuti dengan pernyataan bahwa Hadi masih menjabat sebagai presiden Yaman yang pada saat itu sedang menerima serangan dari kelompok Houthi (Petrova, 2017).

Arab Saudi memandang bahwa kerja sama antara kelompok Houthi dan Iran merupakan ancaman baginya, mereka berpendapat bahwa kerja sama antara kelompok Houthi dan Iran akan mempengaruhi ideologi yang mereka anut yaitu Sunni. Dengan memulai pergerakannya Arab Saudi membuat aliansi dengan berbagai negara seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan untuk mengintervensi konflik yang ditimbulkan Houthi di Yaman. Ideologi bukan menjadi alasan utama bagi Arab Saudi dalam melakukan intervensi terhadap Yaman, mereka melihat letak geografis Yaman yang memiliki potensi pada bidang sumber daya dengan kadar tanah yang subur terlebih posisi dari adanya Bab-el- Mandeb yang menjadikan Yaman sebagai incaran bagi negara-negara lain (M,S, 2018).

Tidak hanya Arab Saudi yang tergerak akibat konflik tersebut, Amerika Serikat yang memiliki julukan *great power nation* memiliki pandangan bahwa kelompok Houthi ini mampu menyebabkan ancaman bagi masyarakat dunia. Amerika Serikat menempatkan diri pada konflik ini sebagai negara besar yang

menganggap perlunya memberikan bantuan terhadap konflik tersebut, yang kemudian juga di dukung dari permintaan bantuan oleh pemerintah Yaman yang langsung meminta kepada Amerika Serikat (Putri, 2018).

2.2. Upaya PBB dalam Menanggapi Konflik Yaman

2.2.1 Bantuan Dana

Secara garis besar PBB merupakan organisasi internasional yang berperan sebagai fasilitator bagi negara keanggotaannya, baik dalam penyelesaian masalah maupun dalam pemberian bantuan terkait negara yang sedang membuyhkan. Konflik yang terjadi di Yaman sudah dikatakan sebagai bencana nasional yang juga berdampak kepada negara-negara lain, Yaman yang merupakan salah satu negara keanggotaan PBB juga berhak mendapat bantuan entah berupa fasilitas maupun dana, dilihat dari segi konflik maupun korban konflik yang terdampak, bagi masyarakat Yaman sangat membutuhkan bantuan.

Tercatat bahwa Yaman mengalami kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, terdapat ribuan korban meninggal dunia, jutaan warga terkena dampak konflik, serta penyakit yang semakin menambah dan memburuk sebab fasilitas yang semakin memprihatinkan juga. Permasalahan yang menyangkut krisis kemanusiaan berupa kekayaan, wajah penyakit, kekurangan air bersih, tempat tinggal serta akses kesehatan. Tidak hanya membutuhkan bantuan dana maupun fasilitas, keadaan ini juga sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk merealisasikan segala bantuan, namun pada prakteknya wilayah Yaman sedang

menjadi wilayah perang yang mana sulit untuk mengkoordinir sumber daya manusia yang masuk kedalam wilayah tersebut.

Dalam salah satu langkahnya PBB membuat program dengan strategi untuk mengurangi dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Yaman, yaitu *Yaman Humanitarian Response Plan* (YHRP) (McGoldrick, 2018). YHRP sendiri memiliki tujuan berupa :

1. Memberi bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang yang kritis melalui respon yang cepat dan efektif,
2. Memastikan semua bentuk bantuan kemanusiaan diberikan secara adil kepada pria, wanita dan anak-anak,
3. Mendukung dan memperbanyak layanan dan lembaga untuk turut aktif membantu bersama,
4. Memberikan respon bantuan yang jelas, multi-sektoral, terkoordinasi dan inklusif yang bertanggung jawab.

Dalam mendukung program YHRP ini, PBB juga menyelenggarakan penggalangan dana dengan membuat pertemuan antar negara-negara anggota. Pertemuan dalam penggalangan dana ini sudah PBB lakukan dari tahun 2015 sampai tahun 2018, pada pertemuan ini juga selain melakukan penggalangan dana juga membahas strategi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Yaman, *High-Level Pledging Event*.

High-Level Pledging Event ini yang pertama diselenggarakan pada 9 November 2015 di New York, Pada pertemuan ini PBB membahas dua topik yakni donasi untuk aktivitas pembangunan dan penanganan masalah pangan dan

pertanian, dengan donasi yang terkumpul sebanyak 57,2 Juta US Dollar. Pertemuan selanjutnya diadakan pada 7 November 2016 dengan topik pembahasan yang masih sama dan dana yang terkumpul ditahun ini sebesar 107,2 Juta US Dollar. Pada tahun selanjutnya pertemuan diadakan pada tanggal 6 November 2017 di Geneva, Swiss, dengan dana terkumpul sebanyak 175,6 Juta US Dollar. Di pertemuan terakhir pada 7 Desember 2018, jumlah donasi yang terkumpul sebanyak 208,7 Juta US Dolar (McGoldrick, 2018).

Tabel 1. Sepuluh Negara Penyumbang Donasi Terbanyak

Negara	Jumlah Total Donasi dalam US Dolar	Persentase
Amerika Serikat	288,68	21,8 %
Uni Emirat Arab	185	14 %
Komisi Eropa	157	11,9 %
Jerman	98,57	7,5 %
Brirania Raya	88,20	6,7 %
Arab Saudi	87,95	6,7 %
Jepang	39,92	3 %
Kanada	32,33	2,4 %
CERF	31,66	2,4%
Swedia	26,88	2 %

Sumber: (McGoldrick, 2018)

Dengan semua dana yang terkumpul alokasi yang dilakukan PBB diatur dengan inklusif, efisien dan transparan. Berikut pemaparan alokasi dana yang diperoleh dengan menggunakan table.

Tabel 2. Alokasi Dana

Bidang	Jumlah yang harus dipenuhi (juta US Dolar)	Jumlah yang terpenuhi (juta US Dolar)	Persentase terpenuhi
Telekomunikasi darurat	5,5	2,8	59,2 %
Koordinasi dan keamanan	26,2	7,7	29,4 %
Proses mekanisme	48,6	17	34,9 %
Logistik	68,5	44,3	64,7 %
Pendidikan	105,4	74,2	70,4 %
Pengungsi	121,6	10,6	8,7 %
Perlindungan	153	53,5	35 %
Tempat tinggal	221,8	13,5	6,1 %
Air bersih	285,5	87,8	30,8 %
Nutrisi	320,3	45,5	14,2 %
Kesehatan	627,2	121,7	18,4 %
Keamanan makanan dan pertanian	2209	592,6	26,8 %

Dana tak terduga		218,2	
Bidang-bidang lain		32,8	

Sumber: (McGoldrick, 2018)

2.2.2. Bantuan Diplomatik

Salah satu langkah diplomasi yang diambil PBB dalam menanggapi pemasakan konflik Yaman yaitu melakukan upaya diplomatik dan lobi politik. Langkah ini menjadi upaya sehat yang diambil karena tidak menggunakan kekuatan militer yang proaktif, juga dengan tujuan agar terciptanya komunikasi yang lancar dari kedua belah pihak yang bertikai, agar permasalahan tidak berkembang lebih besar lagi.

Beberapa upaya diplomatik dan lobi politik yang dilakukan PBB, antara lain:

a. Lobi Diplomatik PBB Terhadap Arab Saudi dan UAE

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Arab Saudi dan UAE telah melakukan intervensi kepada negara Yaman, tidak hanya dalam bentuk politik melainkan militer juga ikut digerakan untuk melawan kelompok Houthi. Aksi intervensi yang dilakukan mereka telah membuat tragedi kemanusiaan semakin memburuk, karena yang diketahui sampai dari serangan ini tidak hanya pada kelompok Houthi melainkan mereka para warga sipil, tempat tinggal dan fasilitas akibat bombardir yang dilakukan Arab Saudi dan UAE.

Dalam rangka pencegahan konflik agar tidak semakin memburuk, PBB melakukan negosiasi dengan Arab Saudi dan UAE semenjak 2016

melalui keanggotaan kedua negara dalam *United Nations Human Rights Council* (UNHRC). Selain melaksanakan pendekatan diplomatik melalui UNHRC, PBB melalui utusan khusus kemanusiannya, Lise grande, beberapa kali turun langsung ke Yaman dan melakukan pendekatan dan penyeruan pengakhiran perang dengan beberapa pimpinan militer Arab Saudi dan UAE semenjak 2017. Lise menjadi tulang punggung dari PBB dalam mendapatkan informasi serta melakukan berbagai penyelidikan independen dan netral terkait kondisi terkini dari Yaman (ParsToday, 2018)

Ketika melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, pangeran Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan ini, ada banyak hal yang disampaikan oleh Guterres terkait peluang Terciptanya perdamaian dalam beberapa konflik yang melibatkan negara Arab termasuk Arab Saudi. Guterres kemudian menyerukan dihentikannya konflik Yaman terhadap Putra Mahkota Saudi, yang dianggap memimpin koalisi negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab yang melakukan intervensi militer di Yaman untuk mendukung pemerintah Yaman dalam memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran (Hutapea, 2018).

PBB juga terus melakukan lobi-lobi diplomatik terhadap UAE, dengan deklarasi UAE yang ingin bergabung dengan dewan keamanan PBB di periode 2020, membuat lini yang dilakukan PBB sedikit terbantu (Kumar, 2017). Secara tidak langsung deklarasi yang diajukan, UAE menurunkan

agresi militernya terhadap Yaman, terutama pada wilayah yang ingin dikuasainya yaitu Pelabuhan al-Hudaydah (ParsToday, 2018).

b. Lobi Diplomatik PBB Terhadap Amerika Serikat

Amerika Serikat berperan tak kasat mata pada konflik ini, tidak secara publik diumumkan, namun tercatat bahwa Amerika Serikat pendukung koalisi negara Arab dalam memerangi isu terorisme terutama pada isu pemberontakan di Yaman. Amerika Serikat secara tegas terus mengambil posisi di beberapa kasus untuk membendung Iran dengan Proxy non-negara yang mereka jalankan, misalkan dalam kasus: Hamas di Gaza, milisi Syiah di Irak, Hezbollah di Lebanon dan Suriah, serta pemberontak Houthi di kawasan Yaman (MataPolitik, 2018).

Karna itu PBB terus melakukan pendekatan terhadap pemerintah Amerika Serikat, berkat pendekatan ini Amerika Serikat mau memfasilitasi pertemuan Guterres dan Pangeran Saudi, Amerika Serikat juga membantu PBB dalam berbagai upaya termasuk mengecam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya, karena dianggap mendukung terorisme dan melakukan destabilisasi di Yaman.

Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump kemudian secara resmi kembali melakukan sanksi militer terhadap Iran sebagai pemicu kegagalan perjanjian nuklir tahun 2015, ditambah berbagai manuver yang dilakukan oleh Iran di kawasan Timur Tengah, yang dianggap Amerika Serikat sangat berbahaya, terutama akan kepentingan Amerika Serikat disana.

Namun pada akhirnya berkat usaha pendekatan yang dilakukan PBB, berhasil meluluhkan petinggi eksekutif, juga para petinggi legislatif, dalam hal ini para senator. Senat mengeluarkan kesepakatan untuk berhenti dalam mendukung pergerakan militer di kawasan Yaman. Terkait keputusan ini, sebanyak 56% senator meminta untuk dihentikannya dukungan untuk koalisi Arab di Yaman, sementara 41% menolak (3% absen). Dalam menyukseskan putusan ini, senat AS menggunakan undang-undang khusus yang diajukan oleh Senator sekaligus Calon Presiden AS 2019-2023, Bernie Sanders, yakni War Authority Act. Undang-undang yang telah disahkan semenjak 1973 ini, memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan presiden AS, apabila keputusannya dianggap membahayakan bagi AS dan konflik bersenjata, terutama apabila mayoritas legislatif tidak menyetujui proyek tersebut dilaksanakan (BBC, 2018).

c. Lobi Diplomatik PBB Terhadap kelompok Houthi

Selain kepada negara luar, PBB juga melakukan negosiasi dengan oposisi pemerintah Yaman, yaitu kelompok Houthi sebagai faktor utama dalam konflik ini. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths tercatat sampai 4 kali berusaha untuk menegosiasikan konflik Yaman dengan kelompok Houthi di Yaman semenjak konflik ini meletus pada 2015. Meskipun pada kenyataannya tidak jarang pertemuan dibatalkan oleh kelompok Houthi karena menganggap PBB masih belum netral terhadap konflik ini, termasuk dalam rencana pertemuan terakhir November 2018 (Azzam, 2018).

Meskipun kerap lobi yang dilakukan selalu gagal namun pada pertemuan di bulan November, Griffiths meminta dalam rangka persiapan perundingan di Swedia, Houthi mau untuk tidak melakukan berbagai agresi militer, agar perundingan di Swedia tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dilihat dari pasca pertemuan yang dilakukan, kelompok Houthi langsung melakukan penghentian serangan drone dan rudal misil ke kawasan Arab Saudi dan UAE, hal ini bahkan langsung dikonfirmasi oleh Kepala Komite Revolusioner Tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi dalam pernyataan resmi tertulis beberapa hari kemudian (Azzam, 2018).

PBB juga beberapa kali mengambil langkah membantu pasukan Houthi demi terciptanya rasa percaya dari Houthi untuk PBB. Saat terjadi pertempuran di wilayah pelabuhan laut merah, Hodeidah pada bulan Juli, PBB mengirimkan pesawat khusus untuk mengangkut setidaknya 50 pasukan Houthi yang luka-luka. Selain mengirimkan pesawat, PBB juga ikut menyertakan 3 dokter dari Yaman dan 1 dokter utusan khusus PBB, untuk membantu para korban setidaknya dapat bertahan sampai pesawat didaratkan di Muscat, Oman. Ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa kelompok Houthi kemudian menerima usaha lobi yang diberikan oleh PBB dikemudian hari, setelah berulang kali ditolak.

2.2.3. Upaya Perdamaian PBB

Dalam rangka mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Yaman, PBB juga menyelenggarakan dialog nasional antara kubu-kubu yang bersangkutan terhadap konflik yang terjadi. Tidak hanya antara kelompok Houthi dan pemerintah

Yaman, namun terhadap negara-negara yang ikut andil atau melakukan intervensi terhadap konflik yang terjadi, berikut beberapa dialog nasional yang diselenggarakan PBB terhadap konflik Yaman.

a. Dialog Nasional Yaman 2015

Pada Februari 2015, PBB mengadakan dialog nasional antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman, dialog nasional ini ditujukan untuk menyelesaikan krisis di Yaman yang semakin membesar akibat kelompok Houthi yang mengambil alih kekuasaan pada 2015, dialog nasional juga dihadiri oleh keseluruhan faksi dan partai politik di Yaman.

Ada beberapa agenda pelaksanaan perundingan nasional ini, agenda utamanya jelas pembahasan tentang kudeta konstitusional yang sedang dijalankan oleh Houthi, lalu terkait ketegangan militer yang terjadi di wilayah Yaman Tenggara dan Yaman Selatan. Begitupula tentang meningkatnya sentiment negatif dari separatistis di wilayah Maarib, Yaman. Secara khusus dalam dialog ini, melalui utasan khususnya, PBB juga membicarakan tentang peluang Abdrabbuh Mansur Hadi untuk diangkat kembali sebagai presiden, akibat kondisi dalam negari yang bergejolak tanpa adanya pemimpin negara yang sah (Sulistyawati, 2015).

b. Dialog PBB - Koalisi Arab - Kelompok Houthi 2016

Pada bulan april tahun 2016, PBB kembali melaksanakan agenda perundingan. Agenda perundingan ini direncanakan dilaksanakan pada 6 april 2016 oleh PBB bertempat di Kuwait. Namun, dialog ini harus ditanggguhkan oleh pemerintah Yaman selama tiga hari sebagai bentuk

protes dari pihak pemerintah Yaman atas serangan kelompok Houthi terhadap pangkalan militer pemerintah Yaman di Sana'a (Times, 2016).

c. Perundingan Konflik Yaman 2017

Paska meningkatnya konflik diantara kedua negara pada 2015 silam, PBB sebagai organisasi dunia yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dunia telah berusaha untuk langsung melaksanakan perundingan di Yaman. Dialog ketiga ini diantara kedua negara bersama PBB dilaksanakan di Sana'a pada Oktober 2017. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths sedari awal memang bermohon kepada kedua pihak yang terlibat untuk menghentikan berbagai peperangan yang dapat berdampak buruk bagi Yaman, yang merupakan salah satu negara Arab termiskin (ParsToday, 2018).

Griffiths yang telah sampai di Sana'a saat itu harus pulang dengan tangan kosong, akibat perundingan yang gagal terlaksana. Kegagalan ini disebabkan karena sabotase Arab Saudi dan Koalisi Arab. Meskipun telah menyepakati terjadinya perundingan diantara kedua negara, pada kenyataannya Arab Saudi dan Koalisi Arab tetap melaksanakan serangan, yang semakin menunjukkan sikap koalisi Arab Saudi dan Koalisi Arab yang haus akan perang, akibat sabotase ini proses perdamaian di Yaman semakin tidak memiliki kejelasan. Koalisi Arab secara terus menerus menolak dan justru meningkatkan serangan ke Yaman menyebabkan proses perdamaian menuju ke arah jalan buntu.

d. Perundingan Konflik Yaman 2018

Perundingan damai yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum membuahkan hasil yang signifikan, pada perundingan di tahun 2018 ini disponsori oleh PBB dan dipimpin langsung oleh utusan khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths dan Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom (Aini, 2018).

Perundingan ini juga didukung oleh Amerika Serikat yang sepakat untuk melaksanakan proses gencatan senjata di Yaman, dengan alasan krisis kemanusiaan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis mendapatkan dukungan di Kongres Amerika Serikat untuk mengurangi bantuan kepada Arab Saudi, November 2018, senat memilih untuk memajukan perdebatan tentang penarikan dukungan AS, yang mencakup pembagian intelijen dan penjualan senjata. Ada beberapa kesepakatan yang disepakati dalam erundingan ini, seperti pertukaran tahanan yang dimiliki kedua pihak, pengembangan proses kepercayaan diantara kedua negara dan ketinggalan proses gencatan senjata (Aini, 2018). Pemerintah Yaman menyatakan jika perundingan berjalan sesuai kesepakatan, maka mereka akan membebaskan sekitar 1,500 hingga 2000 tahanan perang. Kelompok Houthi juga berjanji akan melakukan hal yang sama, termasuk membebaskan mantan Menteri Pertahanan Mahmoud al-Subaihi dan adik Presiden Abedrabbo Mansour Hadi sekaligus mantan pejabat intelijen senior, Nasser (Al-Sayaghi, 2018).

BAB III

ANALISIS PERAN PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM DI YAMAN TAHUN 2015-2018

Pada bagian ini penulis akan mulai memfokuskan peranan serta upaya yang diambil PBB selaku organisasi yang berperan sebagai penjaga perdamaian dunia terutama bagi negara-negara anggotanya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya konflik yang terjadi di Yaman disebutkan sudah menjadi bencana global, krisis kemanusiaan yang terjadi sudah mencapai di level buruk serta banyaknya campur tangan atau intervensi dari negara diluar Yaman.

Analisa yang dijelaskan akan menggunakan konsep *Protecting Human Rights* milik Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles, yang didalamnya terdapat 4 aspek terkait *Setting Human Rights Standard and Norms*, *Monitoring Human Rights*, *Promoting Human Rights*, serta *Enforcing International Human Rights Norms*. Berikut analisis yang dapat disampaikan oleh penulis menggunakan konsep *Protecting Human Rights*.

3.1. *Setting Human Rights Standard and Norms*

Dalam aspek ini PBB sudah sangat menggaris bawahi bahwa HAM merupak instrumen penting dalam sebuah perdamaian. Jika ditarik dari sejarahnya pada tahun 1947 PBB membentuk *United Nations Comissions on Human Rights* (UNCHR) akibat dari sejarah kelam pada oerang dunia II. Pada 10 November 1948

PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang merupakan pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia (Prihandono, 2006, p. 134).

PBB menganggap nilai yang terkandung didalam DUHAM merupakan hukum kebiasaan internasional yang menjadi tolak ukur bagaimana suatu negara telah menjalankan nilai-nilai HAM. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Yang baru dalam perjanjian itu adalah disebutkannya hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti tercantum dalam Pasal 1 perjanjian.

DUHAM merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi manusia. (Prihandono, 2006, p. 133). Perkembangan HAM berikut berakar dari piagam PBB 1945 Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, piagam tersebut menjelaskan secara rinci pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Yaman yang merupakan negara berdaulat juga salah satu anggota PBB, mengalami krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di dalam negaranya. Jika melihat dari warga negara yang terdampak akibat konflik mereka menjadi korban

akibat pelanggaran HAM, meskipun dalam praktiknya yang harus dibenahi sejak awal adalah konflik yang terjadi namun bantuan kemanusiaan kepada korban yang terdampak konflik juga menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan perdamaian yang diprioritaskan oleh PBB.

3.2 Monitoring Human Rights

Pada aspek ini merupakan pemantauan terhadap penerapan hak asasi manusia, yang pada tahapannya memerlukan prosedur untuk menerima pengaduan atau sebuah laporan mengenai pelanggaran HAM dari suatu individu yang terkena dampak atau sebuah kelompok yang berkepentingan dan laporan dari praktik negara. Pemantauan yang terjadi berupa pengumpulan data informasi dari suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode yang tersedia.

Aspek ini akan berkesinambungan dengan upaya-upaya yang diberikan terhadap suatu pelanggaran HAM, guna menilai apakah dengan upaya yang diberikan akan berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak, dengan establisme waktu yang diberikan hasil yang berpengaruh akan didapat jika segala upaya yang dilaksanakan mengikuti dengan kebutuhan yang terjadi.

Pada praktiknya sudah banyak organisasi internasional yang terlibat pada krisis kemanusiaan di Yaman. UNICEF yang berperan dalam membantu kesenjangan kehidupan anak-anak di Yaman, *Food Agriculture Organization* dan *World Food Programme* yang berperan dalam menanggulangi krisis pangan bagi warga Yaman, organisasi internasional lainnya yang bergerak atas dasar kemanusiaan atas krisis yang terjadi di Yaman. Bahkan di dalam kaca mata internasional menganggap krisis kemanusiaan yang terjadi sudah dianggap sebagai

krisis global, berbagai laporan yang ada mengenai krisis yang terjadi di Yaman menjadi prosedur utama bagi PBB pada aspek *monitoring Human Rights*.

Pada tahapan berikutnya PBB memulai tahapan pemantauan terhadap krisis yang terjadi di Yaman, Pada 25 April 2015, Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon menunjuk Ismail Ahmed untuk menjadi atasan khusus PBB untuk menangani krisis Yaman. Tugas Ismail Ahmed yakni menjadi penengah antar kedua belah pihak, memberi saran-saran, dan mengadakan perundingan. Ismail Ahmed juga memberi laporan kepada kantor pusat PBB setiap 60 hari. Ismail Ahmed dapat menjadi perantara antara kedua belah pihak agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Pihak yang berkonflik dapat menyampaikan aspirasinya atau saran melalui Ismail Ahmed (UN, 2018).

Dalam melaksanakan tugasnya Ismail Ahmed melakukan 2 kali perundingan yang mempertemukan kelompok Houthi dan pemerintah Yaman. Perundingan yang pertama diadakan di Swiss pada tanggal 15-21 Desember 2015, hasil dari perundingan ini akhirnya kedua belah pihak telah menyetujui proposal dari PBB. Proposal tersebut yakni kedua belah pihak membubarkan semua blokade agar akses jalan kembali normal, membuka akses bantuan kemanusiaan, melakukan gencatan senjata, melepaskan para tahanan dan menarik semua pasukan militer mundur dari wilayah penduduk. Meskipun kesepakatan ini tetap dilanggar antara kedua belah pihak yang mana tetap terjadinya agresi militer terhadap pertahanan masing-masing.

Menanggapi kegagalan di perundingan awal Ismail Ahmed menyelenggarakan perundingan ke dua di Kuwait pada April 2016. Dalam pertemuan ini memiliki fokus untuk membuat pemerintahan yang lebih inklusif dan

mengembalikan otoritas negara kepada negara, yang telah terbagi antara pemerintahan Yaman dan pemerintahan Houthi serta mengakhiri aksi saling serang. Namun perundingan ini pun gagal, kelompok Houthi pergi meninggalkan lokasi di tengah perundingan yang menganggap sudah tidak ada keuntungan bagi mereka (Ghobari, 2016).

Pada tanggal 16 Februari 2018, Sekretaris Jendral Antonio Guterres menunjuk Martin Griffiths sebagai utusan khusus PBB untuk Yaman menggantikan Ismail Ahmed (UN, Martin Griffiths Profile, 2018). Penggantian ini bertujuan untuk mengawali periode baru mendamaikan krisis Yaman.

Pada masa utusannya Martin Griffiths mengadakan pertemuan yang berlokasi di Swedia pada tanggal 6-13 Desember 2018, pertemuan yang dihadiri kelompok Houthi dan perwakilan pemerintah Yaman ini diselenggarakan atas dasar konflik yang tidak pernah usai dan menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks pada negara dan penduduk Yaman. Dalam pertemuan ini meskipun tidak berjalan sesuai dengan harapan namun kedua belah pihak sudah mulai bisa diajak berkompromi dan menyepakati perjanjian Stockholm.

Perjanjian Stockholm berisi tentang beberapa kesepakatan, yang pertama, saling membebaskan para tahanan. Total tahanan yang ditahan oleh masing-masing pihak mencapai 15.000 orang. Tahanan ini merupakan para pejabat, kerabat maupun penduduk sipil. Kedua, pembukaan kembali bandara Sanaa. Bandara Sanaa merupakan bandara yang vital bagi Yaman. Bandara ini menjadi salah satu yang paling penting untuk fasilitas transportasi bagi penduduk Yaman. Ketiga, mengintegrasikan bank-bank sentral Yaman untuk membayar gaji pegawai negeri. Kelompok Houthi telah menguasai bank-bank yang memiliki peran penting dalam

keseimbangan ekonomi Yaman. Sejak dikuasai oleh kelompok Houthi, bank-bank ini hanya mendukung aktivitas keuangan Houthi. Pengambil alihan bank yang dilakukan oleh Houthi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan menguasai pemerintahan Yaman. Keempat, mengakhiri pertempuran di Hodeida dan Taiz dan Kelima, bersama-sama merancang konsensus rencana untuk berdamai. Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi diharapkan memiliki niat yang baik untuk mencari solusi bersama demi berakhirnya konflik ini (Salisbury, 2018).

3.3 Promoting Human Rights

mempromosikan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam tata Kelola Hak Asasi manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang. Pada aspek ini promosi menjadi kata kunci dalam tahapannya, bagi PBB selaku organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian dunia terutama bagi negara keanggotaannya, melakukan tindakan ataupun beraksi terhadap isu dunia menjadi sorotan bagi negara keseluruhan.

Terkait dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Yaman, upaya dan tindakan yang dilakukan PBB bisa dikatakan sebagai mempromosikan hak asasi manusia, meskipun tujuan utama dalam upaya serta tindakan yang dilakukan adalah guna menyelesaikan konflik yang terjadi namun sedikitnya permasalahan yang diangkat terkait konflik yang terjadi di Yaman ini berupa krisis kemanusiaan yang semakin meningkat.

Pada pembahasan bab sebelumnya PBB pada salah satu upayanya melakukan *High-Level Pledging Event*, yang merupakan pertemuan antara negara keanggotaan PBB dengan pembahasan isu utama krisis kemanusiaan di Yaman.

PBB selalu mempromosikan penanganan isu kemanusiaan serta perdamaian bersama setiap tahun melalui pertemuan ini.

Diluar dari aktor yang tidak bersangkutan, PBB juga melakukan lobi diplomatik kepada negara-negara diluar Yaman yang ikut andil dalam terjadinya konflik tersebut, terutama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Dalam upaya menyelesaikan konflik agar tidak semakin membesar, PBB bernegosiasi dengan Arab Saudi dan UAE semenjak 2016 silam, melalui keanggotaan kedua negara dalam *United Nations Human Rights Council* (UNHRC). Tidak hanya untuk Arab Saudi dan UAE, PBB juga seringkali melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat yang akhirnya setuju dan mengeluarkan kesepakatan untuk berhenti dalam mendukung pergerakan militer di kawasan Yaman.

3.4 Enforcing International Human Rights Norms

Enforcing atau penegakan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu upaya organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi, pada aspek ini dikatakan bahwa terdapat dua pendekatan yaitu *National Court* ataupun *Coercive Measure*. Pada praktik konflik yang terjadi di Yaman, PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB (Danial, 2010).

Tugas Dewan Keamanan PBB sendiri adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota dewan keamanan. Dewan Keamanan diberi Hak

dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang di anggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian atau tindakan agresif.

Pada kasus yang terjadi dalam konflik Yaman, PBB dapat menggunakan cara *Coercive Measure*, karna dalam oraktiknya objek yang dibicarakan berupa negara, yang mana dalam penjelasan Margaret P.karns menyebutkan pendekatan ini dapat digunakan oleh pemerintah dan kelompok negara, dimana masyarakat internasional dapat menjatuhkan sanksi melalui PBB atau IGO regional atau dapat melakukan tekanan internasional terhadap pihak yang melakukan pelanggaran HAM.

Dalam menghadapi permasalahan ini PBB membuat beberapa resolusi dengan tujuan dapat menekan pihak yang berkonflik dan memilih untuk berdamai.

a. Resolusi nomor 2201

PBB mengeluarkan resolusi 2201 pada tanggal 15 Februari 2015 yang berisi tentang kekecewaan PBB terhadap aksi kelompok Houthi yang mengganggu perdamaian Yaman (UN, 2014). Kelompok Houthi telah berusaha untuk mengambil kekuasaan pemerintahan Yaman dan mengganti semua anggota parlemen. Ini adalah aksi yang sudah melebihi batas dan bisa dikategorikan sebagai aksi kudeta. Oleh karena itu PBB mengecam tindakan Houthi yang telah merusak perdamaian Yaman.

Dalam resolusi ini PBB melakukan beberapa tindakan yang ditujukan kepada Houthi agar dipatuhi. Hal-hal yang harus dilakukan Houthi yakni harus memiliki niat untuk bernegosiasi dengan PBB dan pemerintah Yaman, melepaskan kekuasaan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, melepaskan Presiden Hadi dan jajarannya yang telah ditahan, serta menghentikan segala bentuk serangan yang dapat mengganggu perdamaian Yaman.

b. Resolusi nomor 2216

Dewan Keamanan PBB pada 14 April 2015 mengeluarkan Resolusi nomor 2216 tentang konflik di Yaman (UN, 2012). Resolusi tersebut berisikan agar Houthi mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari semua bidang yang telah mereka sita, termasuk ibukota Shana'a, melepaskan semua senjata dan disita oleh pihak keamanan, termasuk sistem rudal, serta menghentikan semua tindakan eksklusif yang sebetulnya dalam kewenangan Pemerintah sah Yaman.

Semua pihak agar menahan diri dari setiap provokasi atau ancaman terhadap negara tetangga, termasuk penggunaan rudal-rudal permukaan serta penimbunan senjata di setiap wilayah yang berbatasan dari negara tetangga. Houthi diminta melepaskan Mayor Jenderal Mahmoud Al-Subaihi, Menteri Pertahanan Yaman, semua tahanan politik, dan semua orang dalam tahanan rumah atau ditahan sewenang-wenang, serta mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak dan membebaskan semua anak-anak dalam konflik Yaman.

menegaskan kembali dukungannya terhadap legitimasi Presiden Yaman AbdRabbu Mansour Hadi, dan menyeru kepada semua pihak dan negara-negara anggota untuk menahan diri dari mengambil tindakan apapun yang merusak persatuan, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Yaman, dan legitimasi Presiden Yaman. Penolakan sewenang-wenang terhadap akses kemanusiaan dan merampas harta benda warga sipil serta kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghambat

pasokan bantuan, merupakan suatu pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

PBB juga mendesak semua pihak di Yaman untuk merespon positif terhadap permintaan Presiden Yaman, menghadiri sebuah konferensi di Riyadh, di bawah naungan Dewan Kerjasama Teluk(GCC), untuk lebih mendukung transisi politik di Yaman, dan untuk melengkapi dan mendukung perundingan yang ditengahi PBB. Resolusi DK PBB 2216 merupakan tindak lanjut permintaan Presiden Yaman AbdRabbu Mansour Hadi, yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB serta kepada Dewan Kerjasama untuk Liga Arab dan negara-negara Arab Teluk agar segera memberi bantuan dengan cara apapun termasuk agresi militer untuk melindungi Yaman dari serangan militer Houthi.

Pada pasal lain Resolusi DK PBB Nomor 2216 mencantumkan soal embargo senjata. Dewan memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pasokan senjata langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengalihan, atau untuk kepentingan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, dan Abd al-Khaliq al-Houthi.

c. Resolusi nomor 2402

PBB mengeluarkan resolusi 2402 pada tanggal 26 Februari 2018. Resolusi ini merupakan bentuk tindakan tegas dari PBB kepada Houthi yang melancarkan serangan-serangan militer kepada pemerintah Yaman (UN, 2018). Serangan tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian dan korban

jiwa meliputi penduduk sipil dan anak-anak. Serangan Houthi juga mengakibatkan penyakit yang menyebabkan korban semakin bertambah.

Resolusi ini berisi tentang pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata. Pembekuan aset kepada kelompok Houthi ini bermaksud agar mereka tidak bisa menjual asetnya untuk membeli alat militer. Sedangkan larangan perjalanan agar mempersempit peluang para penyusup yang ingin mengganggu perdamaian Yaman. Kemudian PBB memberlakukan embargo senjata kepada Houthi bertujuan untuk mengurangi kesempatan Houthi menyerang pemerintah Yaman.

d. Resolusi nomor 2451

Pada tanggal 21 Desember 2018, PBB mengeluarkan resolusi kembali untuk meredam situasi di Yaman yang semakin memburuk (UN, 2018). Pihak Houthi telah melanggar banyak kesepakatan yang disepakati. Houthi melakukan hal ini karena merasa pihaknya dirugikan atas kesepakatan-kesepakatan yang ada. Atas dasar tersebut, Houthi tetap secara berkala menyerang pasukan pemerintah Yaman dan koalisi internasional.

Resolusi ini mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati di Stockholm serta meluruskan kembali segala hambatan untuk implementasi perjanjiannya. Resolusi ini juga bermaksud untuk menahan pihak-pihak yang berkonflik melakukan agresi militer sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Menurut data yang telah dikumpulkan dan juga analisis yang di jabarkan pada bab ke-4, penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PBB yang dianalisis menggunakan konsep *Protecting Human Rights* milik Margaret P, Karns sudah sesuai dengan aspek-aspek yang ada, namun dalam praktiknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Tetapi jika dilihat dari sisi keberhasilan konsep dalam menekan pelanggaran HAM, memang memiliki kemajuan yang berangsur walaupun tidak signifikan. Terlihat dari kepedulian negara lain dalam menggalang donasi untuk bantuan warga yang terdampak konflik di Yaman, setiap tahunnya angka yang di laporkan dalam jumlah nominal terus meningkat.

Upaya pendekatan yang dilakukan PBB pun yang dilihat di awal tahun 2015 mendapat penolakan namun berangsur para pelaku konflik bisa saling menerima perjanjian yang diajukan. Begitupun para negara yang melakukan intervensi ke dalam wilayah Yaman, yang awalnya agresi militer besar-besaran seiring dengan *setting, monitoring* dan *monitoring Human Rights*, di tahun 2018 keadan bisa menjadi sedikit lebih memahami apa sebenarnya konsep awal dari hak asasi manusia.

2.2 Rekomendasi

Bagi penulis, memang isu yang diangkat dari kasus ini berupa hak asasi manusia, namun akar permasalahan dari itu semua bermula dari sikap acuh dan rasa tanggung jawab yang begitu minim. Jika berbicara mengenai konflik yang terjadi di Yaman, konflik ini sudah terjadi dari puluhan tahun lalu akibat perbedaan pendapat ataupun ideologi yang semakin memburuk.

Apakah benar jika mengatakan ini semua akibat pengaruh dari negara adidaya karna adanya system kolonialisme?, atau hirarki dari strata suatu negara. Jika memang iya, maka bagi negara kecil yang pembangunannya jauh dibawah negara maju maka kejadian ini akan terus terjadi tanpa bisa diputus, seperti menjadi peran bagi mereka yang lahir dalam negara kecilpun akan meninggal dalam keadaan megara mmiskin.

Salah satu komponen yang dapat menjadikan suatu negara menjadi negara maju ialah memiliki militer yang kuat dalm artian negara yang siap berperang, namun nasib bagi negara kecil hanya akan mengikuti negara besar yang semakin berkembang dengan memanfaatkan negara-negara kecil mempertaruhkan keamanannya kepada negara maju tersebut. Padahal ironisnya dalam konflik yang terjadi di Yaman ini, saat konflik semakin membesar karna adanya intervensi dari Arab Saudi dan Amerika Serikat karna adanya bantuan senjata militer dan semoa komponen perang, yang mana hal ini jelas menghabiskan banyak biaya, namun dala laporan yang di perlihatkan PBB dalam penggalangan dana yang diajukan kedua negara tersebut juga menjadi negara yang berkontribusi besar dalam mengeluarkan dana bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2018, April 3). *PBB Minta Konflik Yaman Diselesaikan Lewat Perundingan*. Retrieved from republika.co.id:
<https://www.republika.co.id/berita/p6m0to382/pbb-minta-konflik-yaman-diselesaikan-lewat-perundingan>
- Al-Sayaghi, M. (2018, Desember 7). *PBB Minta Perundingan Damai Yaman dan Houthi Tanpa Prasyarat*. Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181207022510-120-351752/pbb-minta-perundingan-damai-yaman-dan-houthi-tanpa-prasyarat>
- Antoni. (2012, maret 12). *icrc-annualreport*. Retrieved from icrc.org:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annualreport2012.pdf&ved=0ahUKEwi1n8iBr7vXAhXkYJoKHWDmAs0QFggzMAQ&usg=AOvVaw1x6e_JhzBNogUXk6c2j4Vaw1x6e_JhzBNogUXk6c2j4
- Azzam, M. A. (2018, November 22). *Utusan PBB untuk Yaman datangi kelompok Houthi*. Retrieved from aa.com.tr: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/utusan-pbb-untuk-yaman-datangi-kelompok-houthi-/1318088>
- Bayoumy, Y., & Ghobari, M. (2014, Desember 15). *Iranian support seen crucial for Yemen's Houthis*. Retrieved from reuters.com:
<https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-iran-insight/iranian-support-seen-crucial-for-yemens-houthis-idUSKBN0JT17A20141215>
- BBC. (2018, Desember 14). *Senat AS: Hentikan dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam perang di Yaman*. Retrieved from BBC.COM:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46562331>
- Biederman, S. (2016). The Changing Nature of International Organization: An Argument Eclectic. *Student Journal of International Relation*, 67-88.
- Clapham, A. (2007). *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Danial. (2010). PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN . *journal.unas.ac.id*.
- Devi, S. (2017). Millions In Need Of Humanitarian Assistance In Yemen. *The Lancet*.
- Ghafur, M. (2015). Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, Aljazair. *Jurnal Penelitian Politik*, 127.
- Ghobari, M. (2016, April 21). *U.N.-sponsored Yemen peace talks begin in Kuwait*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-talks/u-n-sponsored-yemen-peace-talks-begin-in-kuwait-idUSKCN0XI2B2>
- Hutapea, R. U. (2018, Maret 28). *PBB Serukan Setop Konflik Yaman, Ini Kata Putra Mahkota Saudi*. Retrieved from Detik News:
<https://news.detik.com/internasional/d-3940908/pbb-serukan-setop-konflik-yaman-ini-kata-putra-mahkota-saudi>

- Jediza, F. (2017). Kondisi umum dan Pemicu yang menyebabkan terjadinya konflik internal di Yaman. *Parahyangan*.
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & W, K. (2015). *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance 3rd edition*. USA: riener.com.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 39.
- M,S, M. (2018). Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Syuriah dan Yaman) vol.2. *Gama Societa*, 106.
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- MataPolitik. (2018). *Kecam Iran, Amerika Justru Berkontribusi atas*. matapolitik.com.
- Maulana, M. (2018). persaingan kekuatan Saudi Arabia (sunni) dan Iran (syiah) pada kasus konflik kontemporer (Suriah dan Yaman). *ama Societa*, 106.
- McGoldrick, J. (2018). *Yemen: Humanitarian Response Plan January-December 2018*. Yaman: OCHA, UNCT Yaman.
- Nikbakht, D., & McKenzie, S. (2018, April 03). *CNN*. Diambil kembali dari <http://edition.cnn.com/2018/04/03/middleeast/yemen-worlds-worst-humanitarian-crisis-un-intl/index.html>
- O'Connor, D., Boyle, P., Ilcan, S., & Oliver, M. (2017). Living with insecurity: Food security, resilience, and the World Food Programme (WFP). *Global Social Policy*.
- ParsToday. (2018). *Dewan HAM PBB Selidiki Kejahatan Saudi di Yaman*. jakarta: parstoday.ir.
- ParsToday. (2018, Desember 4). *Ketika PBB Seru Hentikan Perang di Yaman*. Retrieved from parstoday.ir: https://parstoday.ir/id/news/middle-east-i64986-ketika_pbb_seru_hentikan_perang_di_yaman
- Petrova, M. (2017, November 3). *Too Many Actors Means Resolution in Yemen Far Off*. Retrieved from reliefweb.int: <https://reliefweb.int/report/yemen/too-many-actors-means-resolution-yemen-far>
- Prihandono, I. (2006). International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia vol.4. *Hukum Internasional*, 134.
- Putri, T. Y. (2018). *KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT – ARAB SAUDI PADA KONFLIK YAMAN DALAM UPAYA PEMBENDUNGAN PENGARUH IRAN DI YAMAN*. Pasundan: repository.unpas.ac.id.
- Roth, K. (2019, September 3). *World Report*. Retrieved Agustus 15, 2022, from HRW.org: <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen#:~:text=According%20to%20the%20Yemen%20Data,are%20at%20risk%20of%20famine>
- Saja, P. (2021, November 13). *6 Fakta Perang Saudara di Yaman, Konflik Terburuk di Dunia Saat Ini!* Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/world/pri-145/6-fakta-perang-saudara-di-yaman-konflik-terburuk-di-dunia-saat-ini-c1c2/6>
- Salisbury, P. (2018, Desember 21). *What does the Stockholm agreement mean for Yemen?* Retrieved from washingtonpost.com: [43](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- cage/wp/2018/12/21/what-does-the-stockholm-agreement-mean-for-yemen/?noredirect=on
- Sulistyawati. (2015, Februari 10). *PBB: Semua Parpol Yaman Sepakat Hadiri Dialog*. Retrieved from republika.co.id:
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/02/10/njiylz-pbb-semua-parpol-yaman-sepakat-hadiri-dialog>
- Times, T. P. (2016, Mei 5). *Tiga Hari Ditangguhkan, Dialog PBB soal yaman kembali digelar*. Retrieved from tanjungpuratimes.com:
<http://thetanjungpuratimes.com/2016/05/05/tiga-hari-ditangguhkan-dialog-pbb-soal-yaman-kembali-digelar/>
- UN. (2012). *Special Envoy Yemen*. dppa.un.org.
- UN. (2014). *Reports submitted by / transmitted by the Secretary-General to the Security Council in 2014*. UN.ORG.
- UN. (2018, Mei 5). *Martin Griffiths Profile*. Retrieved from un.org:
<https://www.un.org/sg/en/content/profiles/martin-griffiths>
- UN. (2018). *Safety of civilians in key Yemeni port, 'intrinsicly' linked to restarting long-term peace negotiations: UN Special Envoy*. news.un.org.
- UN. (2018). United Nations in Yemen. *United Nation*.
- Yee, V. (2020, Juni 2). *Threatening Food and Health Programs*. Retrieved Agustus 14, 2022, from NYTimes.com:
<https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/middleeast/yemen-Saudi-united-nations-aid.html>

